

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara kepulauan yang terdapat pulau besar dan kecil kurang lebih 13.677 pulau dan mempunyai garis pantai yang sangat panjang yaitu kurang lebih 80.000 km. Posisi wilayah negara Indonesia yang terletak di khatulistiwa menyebabkan wilayah Indonesia ini beriklim tropis. Namun disamping itu, ada beberapa kondisi dari letak wilayah Indonesia yang menjadikan wilayah Indonesia ini rawan bencana (Munir, 2014). Geologis pulau-pulau di Indonesia ada pada jalur penunjaman lempeng bumi, diantaranya penunjaman Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Benua Eurasia yang berada di sepanjang pantai bagian barat Pulau Sumatera hingga pantai bagian selatan Pulau Jawa hingga ke timur sampai Kepulauan Nusa Tenggara. Dengan terdapatnya proses penunjaman lempeng bumi ini menyebabkan Kepulauan Indonesia terdapat banyak gunung api, terutama di wilayah Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara (Nur, 2010). Posisi ini yang menjadikan wilayah negara Indonesia sangat rawan akan bencana alam yaitu bencana gempa bumi, dalam skala rendah maupun tinggi. Penunjaman lempeng yang keras dan diikuti dengan gempa yang bersumber dari perairan laut akan menimbulkan potensi bencana tsunami.

Wilayah pesisir adalah wilayah yang sangat penting bagi masyarakat pesisir dalam berbagai bidang baik bidang ekonomi, edukasi, maupun wisata. Pesisir memiliki sumberdaya alam yang melimpah serta fungsi-fungsi ekologis yang penting bagi kehidupan. Keberadaan wilayah pesisir sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah tersebut, namun wilayah pesisir merupakan wilayah yang dinamis sehingga banyak faktor yang dapat mengganggu atau bahkan merusak wilayah pesisir tersebut seperti bencana alam ataupun kegiatan eksploitasi dari manusia sendiri (Suprpto *et.al*, 2016).

Tsunami adalah salah satu bencana yang selalu mengancam masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir. Tsunami merupakan gelombang pasang yang terjadi akibat gempa tektonik, letusan gunung api di lautan dan juga bisa akibat adanya badai, terutama pada negara yang wilayah pesisirnya dangkal (Jokowinarno 2011). Meskipun jarang terjadi, akan tetapi daya hancurnya yang besar menjadikan bencana alam ini patut untuk diperhitungkan.

Bencana tsunami bukan peristiwa yang baru bagi masyarakat Indonesia. Menurut kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB,2018) telah terjadi bencana tsunami sebanyak 177 di Indonesia mulai dari tahun 1629 sampai tahun 2018 dan 8 diantaranya merupakan bencana tsunami besar yang mengakibatkan kerusakan dan memakan korban jiwa. Delapan kajian tersebut diantaranya ; 1) Tsunami Barat Sulawesi pada tanggal 23 Februari tahun 1969, 2) Tsunami Sumba dengan kekuatan 7 skala richter pada tanggal 19 Agustus tahun 1977, 3) Tsunami Pulau Flores dengan kekuatan 7,5 skala richter pada tanggal 12 Desember 1992, 4) Tsunami Banyuwangi,Jawa Timur dengan kekuatan 7,2 skala richter pada tanggal 2 Juni tahun 1994, 5) Tsunami Pulau Biak, Irian Jaya dengan kekuatan 8,2 skala richter pada tanggal 17 Februari tahun 1996, 6) Tsunami Kepulauan Banggai dengan kekuatan 6,5 skala richter pada tahun 2000, 7) Tsunami Nangroe Aceh Darusalam dengan kekuatan sekitar 8,9 skala richter pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pukul 07.59, serta yang terbaru adalah 8) Tsunami Palu dan Donggala dengan kekuatan 7,4 skala richter yang terjadi di penghujung tahun 2018.

Penanganan bencana merupakan salah satu proses dinamis, terpadu dan berkelanjutan guna dapat meningkatkan kualitas pencegahan,mitigasi bencana, evakuasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali. Mitigasi merupakan tindakan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi dampak negatif akibat suatu bencana. Kegiatan mitigasi bencana merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanganan bencana yang di utamakan untuk mengurangi potensi dampak yang ditimbulkan oleh bencana yang diprediksikan akan terjadi di waktu yang akan datang (Jokowinarno 2011).

Berdasarkan penjabaran diatas, salah satu wilayah yang berpotensi akan terjadinya bencana tsunami yaitu wilayah pesisir Selatan Jawa, satu diantaranya yaitu Kabupaten Malang. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dari (BMKG) salah satu gempa bumi tektonik yang pernah terjadi pada pada tanggal 8 Juli 2013 berpusat di 112 km tenggara Kota Malang berkekuatan 5,9 SkalaRichter. Kondisi kawasan pesisir Malang Selatan yang menghadap langsung ke Samudera Hindia mempunyai potensi rawan akan bencana tsunami. Berdasarkan kondisi tersebut, informasi daerah rawan tsunami beserta jalur evakuasinya sangat penting dan di butuhkan oleh masyarakat Malang Selatan guna meminimalisir dampak dan jumlah korban dari bencana tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan akan terjadinya bencana. Salah satu bencana besar yang mengancam wilayah pesisir yaitu bencana tsunami. Tsunami terjadi akibat adanya bencana gempa bumi yang bersumber dari dasar laut, tsunami tidak dapat dicegah namun ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang diakibatkan oleh gelombang tsunami tersebut yaitu melalui perencanaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana, sehingga menjadi rumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana klasifikasi tingkat resiko terhadap bencana tsunami berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi.
2. Mitigasi apa saja yang perlu dilakukan dalam minimalisasi akibat bencana tsunami.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Mengklasifikasikan tingkat kerawanan bencana tsunami wilayah pesisir berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi.
2. Menentukan mitigasi bencana tsunami.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini terkait mitigasi bencana tsunami yang berfokus pada pembagian tiap wilayah menjadi beberapa kelas berdasarkan tingkat resiko terhadap bencana tsunami dan kemudian mengkaji mitigasi apa yang perlu dilakukan pada wilayah tersebut.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari skripsi ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat pesisir mengenai klasifikasi wilayah yang beresiko terhadap tsunami.
2. Memberikan informasi mengenai tindak lanjut mitigasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan masyarakat sekitar wilayah pesisir.